

# Makna 64 Tahun Merdeka

18/08/2009 23:55:55 WIB

Oleh Mudrajad Kuncoro\*)

## JAKARTA, INVESTOR DAILY

Tahun 2009 ini merupakan tahun yang penuh momentum bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tahun ini, kita tidak hanya memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64, *tumbuk warsa* atau 8 windu. Namun juga 101 tahun Kebangkitan Nasional, 81 tahun Sumpah Pemuda, dan 11 tahun Reformasi. Pertanyaan yang mendasar untuk diajukan: Sudahkah kita merdeka? Merdeka dalam arti tidak hanya bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, namun “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, terorisme, dan korupsi?

## Dampak krisis

Krisis ekonomi Asia tahun 1997-8 lalu sudah 11 tahun berlalu. Akibat dari krisis tersebut, segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia terkena dampak yang sangat besar. Kondisi pada tahun 1997, kemiskinan di Indonesia menyentuh angka yang sangat tinggi, sebesar 40,3% atau meningkat 22,6% dari tahun 1996. Menurut catatan resmi pemerintah, tingkat kemiskinan menurun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% tahun 2008, bahkan menjadi sekitar 14% tahun 2009. Bila angka ini dapat dipercaya, rekor kemiskinan tersebut adalah paling rendah, baik besaran maupun persentasenya, selama 11 tahun terakhir.

Bagaimana dengan tingkat pertumbuhan ekonomi? Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat krisis 1998 tercatat mengalami kontraksi hingga negatif 13,1%. Sejak itu, Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah hanya sekitar rata-rata 4,5% per tahun. Bahkan tahun 2008 perekonomian Indonesia mampu mencapai tingkat pertumbuhan mencapai 6,1%, rekor tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Kendati demikian, krisis keuangan global tahun lalu berdampak tidak sehebat krisis Asia 1998. Analisis saya dkk berjudul 'Survey of Recent Development' dalam jurnal internasional terbitan Australian National University, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, edisi Agustus 2009 membandingkan kedua krisis ini (<http://www.mudrajad.com>). Ketahanan ekonomi Indonesia kini jauh lebih kuat dibanding 11 tahun lalu dilihat dari berbagai indikator ekonomi kunci.

Hanya tiga pasar yang terguncang akibat krisis 2008 adalah pasar modal, pasar valas, dan ekspor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus di atas 2.800, namun anjlok drastis hingga 1.111. penyebabnya karena 67% bursa Efek Indonesia dikuasai oleh para pemain asing. Kurs rupiah yang stabil di Rp 9.000-10.000 di era SBY sempat melemah terhadap dolar AS hingga hampir mencapai Rp 13.000. Ekspor juga merosot hingga 30% selama Januari-April 2009 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak krisis ekonomi terhadap pengangguran baru terasa pada tahun-tahun pascakrisis 1998. Ini terlihat dari tingkat pengangguran akibat PHK besar-besaran dan banyaknya penutupan usaha yang terus meningkat. Pada tahun 1998, pengangguran di Indonesia meningkat menjadi sebesar 5,5% dari sebelumnya 4,7% pada 2007. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya pengangguran terus meningkat sampai menyentuh 10,28% pada 2006, turun menjadi 9,9% pada 2007, dan menjadi 8,5% pada Februari 2008. Relatif tingginya angka pengangguran menunjukkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 6% pascakrisis belum mampu menyerap tambahan kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial. Inilah fenomena yang disebut *jobless growth*.

Dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, GDP per kapita Indonesia hanya menduduki peringkat 4 dari 8 negara Asean. GDP per kapita Indonesia sebesar US\$ 1.924,73 masih kalah jauh dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Demikian juga bila dihitung dengan *purchasing power parity*, ternyata GDP per kapita Indonesia hanya US\$ 3.843, yang menempati peringkat 107 dari 177 negara di dunia.

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Manusia seharusnya merupakan hakikat dari tujuan pembangunan, bukan hanya “kue pembangunan” dan “pertumbuhan kue”. Sulit dikatakan ada pembangunan bila kemiskinan, pengangguran, anak busung lapar dan gizi buruk masih substansial.

Salah satu indikator yang populer untuk mengukur kinerja pembangunan manusia adalah HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi melek huruf dewasa dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto, serta standar hidup layak (*decent standard of living*) sebagaimana diukur oleh PDB riil per kapita dan dinyatakan dalam paritas daya beli.

Menurut *Human Development Report 2007-2008*, HDI Indonesia sebesar 0,728, yang berada dalam peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh UNDP. Indeks GDP Indonesia mencapai 0,609. Angka harapan hidup orang Indonesia mencapai 69,7 tahun, atau dinyatakan dalam indeks harapan hidup mencapai 0,745. Indeks pendidikan mencapai 0,83 karena angka melek huruf sebesar 90,4% dan rata-rata rasio masuk sekolah dari SD sampai SMU mencapai 68,2%. Dengan kata lain, belum seluruh rakyat Indonesia “merdeka dari kebodohan”.

## Refleksi

Selama 64 tahun merdeka ternyata belum sepenuhnya merdeka bagi banyak anak bangsa di negeri yang kaya dengan sumberdaya alam dan obyek wisata. Apa arah pembangunan dan reformasi Indonesia salah? Boediono, calon wakil presiden RI 2009-2013, dalam buku “Ekonomi Indonesia Mau Ke mana” (2009) mengatakan bahwa Indonesia belum keluar dari zona aman meski arah pembangunan demokrasi sudah ‘on the right track’. Batas krisis bagi demokrasi adalah bila pendapatan per kapita mencapai US\$ 6.600 berdasarkan paritas daya beli.

Dalam konteks inilah, sangat menarik untuk mencermati pesan utama Presiden SBY saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan DPR 14 Agustus lalu. SBY menekankan pentingnya reformasi gelombang kedua yang pada hakikatnya membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 tahun yang lalu, sehingga tahun 2025 Indonesia bergerak menuju negara maju.

Visi, misi, dan strategi SBY-Boediono dituangkan dalam buku berjudul ‘Membangun Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan’ (2009). Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Misinya, melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Untuk mewujudkan visi-misi tersebut, agenda utama pembangunan nasional 2009-2014 meliputi: (1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) Perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) Penegakan pilar demokrasi; (4) Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; (5) Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tidak hanya *policy mix* makro, namun koordinasi dan sinergi lintas sektor dan daerah. Ini karena pola perencanaan dan pembangunan Indonesia bersifat sektoral meski melibatkan 500-an kabupaten/kota serta 33 provinsi. Banyak kepala daerah mengeluh kurang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan strategik level nasional. Selama mereka menjabat diakui kurang dari 5 kali bertemu presiden/wapres.

Ke depan agaknya mekanisme perencanaan, anggaran dan formulasi kebijakan perlu diubah agar tidak terjadi pembangunan yang cenderung ego sektoral maupun fanatisme daerah yang berorientasi jangka pendek dan proyek. Barangkali peran strategis wapres perlu ditingkatkan sekaligus sebagai ‘menteri koordinator’ yang menjalankan wewenang khusus dalam sinergi kebijakan sektoral, makro dan daerah. Inilah pentingnya peran presiden & wapres menjadi ‘dirigen suatu orkestra’ kebijakan makro, sektoral, dan daerah.

Sejarah membuktikan rakyat Indonesia bisa *survive*, meski krisis dan cobaan tidak berhenti. Cobaan dan krisis, dari krisis moneter, krisis BBM, krisis listrik, krisis energi dan pangan global, bencana alam (tsunami, gempa bumi, banjir, longsor), pasti akan dan selalu membayangi langkah Indonesia di masa depan. Perencanaan yang antisipatif terhadap berbagai ‘gangguan’ (*disruption*) alam maupun internasional mutlak dibutuhkan.

Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 155, Allah berfirman, “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” Dengan demikian, betapapun berat krisisnya, Indonesia harus bisa merdeka dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan korupsi. Inilah hakikat makna kemerdekaan di era reformasi. Jelas ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua.

Kebangkitan ekonomi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani masih membutuhkan jalan yang panjang,berliku serta banyak lubang. Meski arah jalannya sudah ‘on the right track’ agaknya perlu pindah ke gigi yang lebih tinggi (*shifting into the higher gear*) mengejar ketinggalan dibanding negara lain.

Mari kita bersatu merajut kebersamaan yang sempat tercerai berai akibat pileg & pilpres. Indonesia pasti bisa. Saya yakin

semua anak bangsa suatu saat akan berkata, 'Saya bangga sebagai bangsa Indonesia'. Dirgahayu Republik Indonesia!

*\* Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D adalah Chief Economist PT Recapital Advisors; penulis buku 'Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global'.*